Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 : *170-176*
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
DOI: 10.33592/jiia.v15i2.7816

p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

Implementasi Kebijakan Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

(Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat)

Implementation of The Digital Population Identity Application Program Policy by The West Lombok Regency Government

(Case Study of The West Lombok Population and Civil Registration Service)

[1]Ida Yatun Palakyah; [2] Mintasrihardi; [3]Rahmad Hidayat
[1,2,3]Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: idayatun40303@gmail.com

(Diterima: 05-12-2025; Ditelaah: 08-12-2025; Disetujui: 26-12-2025)

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Serta faktor penghambat dalam implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam analisa data penelitian ini menggunakan reduksi data, *display* data serta penarikan kesimpulan dan validitas data. Pada implementasinya program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) menunjukkan bahwa pemerintah turut ikut serta dalam hal memfasilitasi dan memperkenalkan serta melayani masyarakat melalui program identitas kependudukan digital (IKD) yang dimana masih adanya masyarakat yang minim mempunyai android, mengingat program ini mewajibkan pengguna android, dan masih kurangnya dalam menyebarluaskan terkait program sepenuhnya karena masih terdapat beberapa daerah yang belum dikunjungi untuk melakukan sosialisasi aplikasi identitas kependudukan digital. Upaya pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara petugas aktivasi dan pihak yang terlibat.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemerintah

Ida Yatun Palakyah; Mintasrihardi; Rahmad Hidayat (2025). Implementasi Kebijakan Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat)

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Digital Population Identity (IKD) application program by the Government of West Lombok Regency, as well as the inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The data sources consist of primary and secondary data. Data analysis is conducted through data reduction, data display, conclusion drawing, and data validity verification. The implementation of the Digital Population Identity (IKD) application program indicates that the government has actively participated in facilitating, introducing, and providing services to the community through the IKD program. However, challenges remain, including the limited ownership of Android devices among some community members, considering that the program requires Android-based smartphones, and the lack of comprehensive dissemination of information due to several areas that have not yet been visited for socialization of the Digital Population Identity application. In response to these issues, the government has made efforts to improve program implementation by conducting periodic evaluations involving activation officers and relevant stakeholders.

Keywords: *Implementation, Policy, Government.*

A. PENDAHULUAN

Era digital merupakan zaman yang menunjukkan kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan dengan arah transformasi ke bentuk digital, era dimana teknologi akan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Era digital dapat menjadi peluang sekaligus tantangan apabila masyarakat belum siap menghadapi perubahan. Pergeseran gaya hidup dan budaya telah mengalihkan banyak fungsi media cetak ke media digital. Setiap perkembangan yang terjadi akan melahirkan inovasi baru yang memberikan berbagai kemudahan.(Nur et al., 2019)**.** Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berkaitan sebagai dasar hukum Indonesia tentang era digital yakni tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 1 ayat (2) UU ITE tentang perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Teknologi komunikasi dan informasi adalah munculnya cara hidup baru yang berlangsung sejak awal hingga akhir kehidupan yang dikenal sebagai *e-life*, yaitu kehidupan yang telah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan berbasis elektronik (Cholik, 2021). Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memaksa pejabat pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi dan menggunakan teknologi informasi (*E-government)* secara lebih luas. *E-government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta memberikan alternatif kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi publik.(Wirawan, 2020).

Dengan seiring berkembangnya jaman ini maka pemerintah melaksanakan beberapa bentuk pelayanan, salah satu bentuk pelayanan tersebut adalah pelayanan identitas kependudukan. Keberadaan internet di masyarakat tentu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Salah satu program pemerintah dalam perlindungan data pribadi yakni melalui program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan inovasi untuk digitalisasi dokumen dan modernisasi administrasi dalam bentuk teknologi informasi. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk

mengakses dan mengelola data pribadi secara elektronik (Salamena & Emanuel, 2024).

Pengelolaan IKD bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pencatatan kependudukan agar masyarakat dapat memperoleh data dan informasi yang akurat, lengkap, terkini, dan mudah diakses. IKD tidak hanya berperan sebagai database, tetapi juga mewakili perusahaan dalam bentuk aplikasi digital yang efisien. Layanan tersebut antara lain pencetakan kartu keluarga, pencetakan data warga nasional Indonesia (WNI), pengajuan perubahan golongan darah, pemisahan atau penggabungan kartu keluarga, dan penyerahan akta kelahiran dan kematian. Program Identitas Kepndudukan Digital (IKD) ini masih minim penelitian dan terbilang merupakan program baru pada Kabupaten Lombok Barat, dan penulis ingin melakukan kajian mendalam dengan topik "Implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat". Penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III untuk menganalisis implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan mempertimbangkan empat faktor kunci komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi IKD pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dengan memberikan data yang komprehensif mengenai implementasi identitas kependuduan digital (IKD) di Kabupaten Lombok Barat.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tuturan lisan atau tulisan dari subjek penelitian, termasuk perilaku dan situasi yang dapat diamati (Dahlan, 2022).Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi: Mengamati langsung aktivitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat.
2. Wawancara: Melakukan wawancara mendalam dengan Kepala Bidang Bagian Umum Kepegawaian, Petugas Pelayanan, dan masyarakat.
3. Dokumentasi: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen administrasi yang dihasilkan oleh dinas.

Dalam penelitian kualitatif, Elma Sutriani dan Rika Oktaviani (2019) menjelaskan bahwa data yang berhasil dihimpun merupakan modal awal yang sangat krusial dalam sebuah penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara mendalam dan dijadikan landasan utama dalam proses penarikan kesimpulan. Salah satu teknik yang digunakan untuk menjamin keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi data dapat dilakukan dengan cara menelusuri sumber data lain sebagai pembanding. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan data dapat dimintai penjelasan tambahan guna memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Apabila triangulasi diterapkan pada aspek metode, maka diperlukan pengecekan kembali terhadap metode yang digunakan, seperti dokumentasi, observasi, catatan lapangan, dan metode lainnya. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yaitu Kepala Bidang Bagian Umum Kepegawaian, Petugas Pelayanan, dan masyarakat. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data yang

meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN DISKUSI

Identitas Kependudukan Digital adalah aplikasi berbasis android yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital antara lain KTP, Kartu Keluarga KK (Afifa marsa putri, 2024). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menerapkan program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berlandasan pada ketentuan Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta penyelenggaraan IKD. Dalam peraturan ini penting untuk memastikan implementasinya dilakukan secara konsisten dengan pengawasan yang ketat.

Kementrian Komunikasi dan Informatika mengemukakan bahwa terdapat beberapa manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu:

1. Menghemat biaya pembuatan kartu identitas, karena pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi biaya pencetakan dan distribusi.
2. Mencegah pemalsuan atau penyalahgunaan data kependudukan, melalui penerapan teknologi keamanan yang canggih serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi informasi pribadi.
3. Proses pembuatan lebih cepat dan praktis, karena penggunaan sistem terintegrasi dan otomatisasi memungkinkan setiap tahapan diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat.
4. Tidak perlu disimpan dalam bentuk fisik, karena data IKD dapat disimpan secara digital di dalam smartphone, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan.. (Dhiyanti.nawang, 2024).

Edward George Edward III dalam Nugraha (2009) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), komitmen (*disposition or attitude*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Eko Handoyo, 2015). Adapun pembahasan dari keempat isu pokok terkait pengimplementasian program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Penvatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut:

Komunikasi: komunikasi digunakan agar implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam mengkomunikasi suatu kebijakan kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi, pada pelaksanaan nya sudah maksimal, walaupun sebagian masyarakat masih belum mengetahui program tersebut, adanya komunikasi dapat memudahkan masyarakat dalam memahami dan mengetahui manfaat serta meningkatkan pengetahuan tentang program aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan menyadari pentingnya teknologi (digital) saat ini.

Sumber daya: Sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya

kebijakan dengan baik, maka dengan dalam pelaksanaan program ini itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup serta di tingkatkan skill (kemampuan), dan sumber Daya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat, selain SDM dibutuhkan sumber daya seperti teknologi dalam pelaksanaan suatu kebijakan seperti komputer dan android.

Disposisi: disposisi yang diperlukan adalah kemampuan untuk mengakses aplikasi dan memahami fungsi-fungsi yang tersedia. pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias atau kesalahan. Disposisi yang diperlukan adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan fitur keamanan untuk melindungi data kependudukan.

Struktur birokrasi: Salah satu aspek struktural terpenting dari sebuah organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana pelaksana. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu program biasanya terjadi adanya kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga negara dan pemerintah sering menjadi penyebab *inefektivitas* dalam pelaksanaan kebijakan, dengan adanya struktur birokrasi ini memastikan bahwa masyarakat dapat menerima dengan baik sesuai kebutuhan.

Tabel.1 Jumlah Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

No	Bulan	Jumlah aktivasi	Persentase
1	Januari	3,823	0,71%
2	Februari	3,914	0,73%
3	Maret	4103	0,74%

(Sumber: Laporan Registrasi Pendudukaan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat) 2025

Data terakhir menunjukkan bahwa pada bulan Januari jumlah aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tercatat sebanyak 3.823 orang atau sebesar 0,71%. Pada bulan Februari, jumlah aktivasi meningkat menjadi 3.914 orang atau 0,73%, sedangkan pada bulan Maret tercatat sebanyak 4.103 orang atau 0,74% masyarakat yang telah melakukan aktivasi aplikasi IKD.

Diskusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lombok Barat tahun 2025, belum berjalan secara optimal. Rata-rata tingkat aktivasi di setiap kecamatan masih tergolong rendah. Hal ini

mengindikasikan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan IKD. Adapun kendala dalam program ini dikarenakan merupakan program *online* sehingga pengguna diwajibkan memiliki android namun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum paham teknologi dan kurangnya pemahamahan masyarakat terkait program ini.

Dalam Fajar Ade Putra Tahun 2024 Pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat bahwa aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sudah dilaksanakan dengan baik dari enam indikator pada teori pelaksanaan oleh George R. Terry dalam Nugroho (2015) yang menjadi acuan atau pedoman dalam penelitian tetapi belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan target nasional. Sehingga penelitian ini akan membahas terkait hasil penelitian tentang pengimplementasian kebijakan program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD. Dengan merujuk dan menyesuaikannya pada dalam model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

D. KESIMPULAN

Beradasrkan Permendagri tentang program aplikasi Identitas Kependudukan Digital diwujudkan melalui pelaksanaan program data kependudukan menggunakan android, yang sebelumnya dokumen kependudukan masih menggunakan berkas-berkas seperti kertas dan blanko yang mempermudah peyimpanan berkas kependudukan dalam bentuk digitalisasi. Implementasi dari pelaksanaan program aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, dengan menggunakan teori Edward III, menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Hal ini terbukti dari berbagai kekurangan yang dialami pelaksana di lapangan, dimana sudah diketahui seberapa banyak masyarakat yang sudah Aktivasi IKD namun masih beberapa masyarakat juga masih masih belum mempunyai android sehingga sebagian tidak bisa mengaktifkan, dan dalam pelaksanaan program ini masih kurang dalam halnya yaitu komunikasi karena masih terdapat beberapa daerah yang belum dikunjungi untuk melakukan sosialisasi aplikasi identitas kependudukan digital.

DAFTAR PUSTAKA

Afifa marsa putri. (2024). *Kebijakan Penggantian Kartu Tanda Penduduk Elektronik Menjadi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas lampung.

Aisiyah Amini. (2022). *Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)*.

Amfiacurniawan. (2022). *Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Amman Mineral Nusa Tenggara (Amnt) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Sekongkang*.

Cholik, C. A. (2021). *Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi / Ict Dalam Berbagai Bidang*. *2*(2), 2746–1209.

Dahlan. (2022). *Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukanterhadap Efektivitaskerja Pegawai (Studi Kasus Camat Hu'u)*.

Debora, A. Y., Qur'anul Kariem, M., & Febriyanti, D. (2021). Good Governance Dalam

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Pada Masa Covid-19. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)* (Vol. 11) http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA

dhiyanti.nawang. (2024). *cara Bikin KTP Digital atau IKD, Sangat Gampang Semenit Jadi* .

Eko Handoyo. (2015). *Kebijakan publik* (Mustrose, Ed.). WidyaKarya.

Firmansyah, A. C., & Rosy, B. (2021). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pembuatan E-KTP di Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)*. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/joa

Fitriani, D., & Hidayat, R. (2023). *Implementasi Kebijakan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Lombok Barat*.

Hidayat, R., Afzal, M., & Erma, S. (2018). Pelayanan Penggunaan Listrik Prabayar (Listrik Elektrik) Pada PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbawa Rayon Alas. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*.

Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, *9*(2), 115. https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020

Nur, T., Sekolah, A., Agama, T., & Darunnajah Bogor, I. (2019). STRATEGI PEMBELAJARAN ERA DIGITAL. In *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains* (Vol. 1, Issue 2).

Salamena, A. M. C., & Emanuel, A. W. R. (2024). Responsivitas Pelayanan Publik Berbasis E-Government Dengan Inovasi Identitas Kependudukan Digital. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, *10*(2). https://doi.org/10.28932/jutisi.v10i2.8618

Salsa Bella, V., & Widodo, D. (2023). Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, *6*(1), 14–31. https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833

Setyawan, D., Priantono Nc, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. In *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)* (Vol. 3, Issue 2).

Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, *5*(2), 162–180. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717

Viani, O., Suherman, A., & Utami, P. (2023). Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang). *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, *13*(2), 83–93. https://doi.org/10.33592/jiia.v13i2.3822

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101